

**DINAMIKA PEMIKIRAN TEOLOGIS AL-MA'MUN:
ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN MAZHAB
MU'TAZILAH DAN ASY'ARIYAH**

Muthia Mahfudzha¹, Binsar Pitua Tambunan², Torkis Barani Rambe³, Rido⁴, Metha Wardiyah⁵, Rafli Alfandi⁶, Sri Windari⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mahfudzhamuthia@gmail.com, binsartambunan119@gmail.com, torgisrambe140@gmail.com,
mhdridhoridho93@gmail.com, metha010106@gmail.com, alfandirafli328@gmail.com,
20201021008@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika pemikiran teologis pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dengan fokus pada peran Khalifah Al-Ma'mun (198-218 H/813-833 M). Studi ini mengkaji bagaimana kebijakan politik Al-Ma'mun, menjadi katalisator bagi perkembangan mazhab Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dengan menjadikan Mu'tazilah sebagai doktrin resmi, Al-Ma'mun memanfaatkan pendekatan rasionalis untuk memperkuat legitimasi dan otoritas politiknya. Kebijakan ini secara langsung mempromosikan pemikiran Mu'tazilah yang menekankan akal dan kehendak bebas, namun pada saat yang sama, memicu resistensi intelektual dari para ulama tradisional.

Sebagai respons, perlawanan tersebut melahirkan mazhab Asy'ariyah sebagai sebuah sintesis yang berusaha menyeimbangkan antara peran akal dan otoritas wahyu. Asy'ariyah hadir untuk menjembatani jurang antara kaum rasionalis Mu'tazilah dan kaum tradisional, sekaligus menegaskan kembali pentingnya teks-teks suci. Melalui pendekatan kualitatif studi literatur (kajian pustaka), penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi politik Al-Ma'mun tidak hanya berhasil melegitimasi Mu'tazilah, tetapi juga secara tidak langsung memicu evolusi pemikiran teologis yang lebih kompleks, yang akhirnya melahirkan dan memperkuat mazhab Asy'ariyah. Dengan demikian, studi ini menyoroti interaksi yang tak terpisahkan antara kekuasaan politik dan perkembangan intelektual dalam sejarah Islam.

Kata kunci: Khalifah Al-Ma'mun, mazhab Asy'ariyah, mazhab Mu'tazilah, kebijakan politik, perkembangan teologi.

Abstract

This research discusses the dynamics of theological thought during the Abbasid Caliphate, focusing on the role of Khalifah Al-Ma'mun (198-218 H/813-833 M). This study examines how Al-Ma'mun political policies acted as a catalyst for the development of the Mu'tazilah and Asy'ariyah schools of thought. By making Mu'tazilah doctrine the official one, Al-Ma'mun utilized a rationalist approach to strengthen his political legitimacy and authority. This policy directly promoted Mu'tazilah thought, which emphasized reason and free will, but at the same time, it triggered intellectual resistance from

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

traditionalist scholars. In response, this resistance gave rise to the Asy'ariyah school as a synthesis that sought to balance the role of reason with the authority of divine revelation. Asy'ariyah emerged to bridge the gap between the Mu'tazilah rationalists and the traditionalists, while also re-emphasizing the importance of sacred texts. Through a qualitative approach of literature review, this study concludes that Al-Ma'mun political intervention not only successfully legitimized Mu'tazilah but also indirectly sparked a more complex evolution of theological thought, which ultimately gave birth to and strengthened the Asy'ariyah school. Thus, this study highlights the inseparable interaction between political power and intellectual development in Islamic history.

Keywords: Caliph Al-Ma'mun, Ash'arite school, Mu'tazilite school, political policy, theological development.

1. Pendahuluan

Perkembangan pemikiran teologis dalam sejarah Islam merupakan cerminan kompleksitas interaksi antara dimensi agama, politik, dan intelektual. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, khususnya di bawah pemerintahan Al-Ma'mun (198-218 H/813-833 M), terjadi sebuah titik kritis di mana kekuasaan politik secara aktif mempengaruhi arah dan karakteristik doktrin teologis Islam.¹ Al-Ma'mun, yang dikenal bukan hanya sebagai seorang penguasa tetapi juga seorang intelektual dan patron ilmu pengetahuan, menjadikan teologi sebagai arena strategis untuk memperkuat legitimasi politik serta memperluas pengaruh ideologis kekhalifahan Abbasiyah.²

Kebijakan politik Al-Ma'mun yang mengusung dan memberikan legitimasi resmi kepada mazhab Mu'tazilah yang menekankan prinsip rasionalitas, kebebasan kehendak manusia (al-ikhtiyar), dan penegakan keadilan ilahi melalui akal menghadirkan sebuah paradigma baru dalam dinamika pemikiran Islam.³ Pendekatan ini tidak hanya menjadi alat politik untuk menegaskan otoritas khalifah melalui mazhab rasionalis, tetapi juga menimbulkan pergeseran signifikan dalam wacana keagamaan yang selama ini didominasi oleh pendekatan tradisional. Namun, dominasi Mu'tazilah di masa Al-Ma'mun ini juga membangkitkan resistensi intelektual dari berbagai pihak, termasuk para ulama yang kemudian mengembangkan mazhab Asy'ariyah sebagai respons kritis terhadap Mu'tazilah, dengan menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu serta menegaskan otoritas teks-teks suci dalam memahami realitas keagamaan.⁵

Kajian ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam bagaimana kebijakan politik Al-Ma'mun berperan sebagai katalisator dalam pembentukan dan penyebaran mazhab Mu'tazilah, sekaligus menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap lahirnya dan penguatan mazhab Asy'ariyah dalam spektrum pemikiran teologis Islam. Melalui pendekatan historiografis dan analitis, penelitian ini mencoba menggali keterkaitan antara kekuasaan politik dan perkembangan doktrin teologis, serta bagaimana interaksi keduanya membentuk lanskap intelektual Islam yang plural dan dinamis. Pemahaman terhadap dinamika tersebut tidak hanya

¹ Wilferd Madelung, *The Theology of Mu'tazilism: Imamate and Rationalism in Early Islam* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 45-50

² Herbert Mason, "Al-Ma'mun and the Mihna", *Journal of Islamic Studies*, 9 (2), hlm. 130-135

³ W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1962), hlm. 55-60

⁴ George F. Hourani, "The Early Growth of the Mu'tazilah", *Journal of the American Oriental Society*, 76 (1), hlm. 15-26

⁵ Daniel W. Brown, *A New Introduction to Islam* (Oxford: Wiley-Blackwell, 2017), hlm. 115-120

relevan untuk konteks sejarah, tetapi juga memberikan wawasan kritis terhadap hubungan antara politik dan agama dalam kontemporer.⁶

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau kajian pustaka. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap interaksi teologis dan politik, yang datanya sudah tersedia dalam berbagai sumber tertulis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasi data secara komprehensif tanpa memerlukan pengumpulan data baru dari lapangan. Peneliti mengidentifikasi dan menelusuri berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik, seperti buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta dokumen-dokumen historis yang kredibel. Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat dan mengorganisasi setiap informasi penting yang ditemukan, termasuk teori, argumen, dan fakta historis yang berkaitan dengan Kekhalifahan Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun, mazhab Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Dalam penelitian ini data yang telah dianalisis dari berbagai sumber disintesis menjadi satu kesatuan narasi yang koheren untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian literatur sebuah proses kritis dan analitis yang menjadikan perpustakaan sebagai "laboratorium" utamanya. Metode ini sangat efektif untuk topik-topik historis, teoretis, atau konseptual, di mana pemahaman yang komprehensif terhadap literatur yang ada menjadi kunci utama untuk menghasilkan karya ilmiah yang valid.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Al-Ma'mun sebagai Patron Intelektualisme Islam

Khalifah Al-Ma'mun (786-833 M), putra dari Khalifah Harun al-Rasyid, dikenal sebagai salah satu penguasa Abbasiyah yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Masa pemerintahannya selama kurang lebih dua dekade sering dianggap sebagai salah satu puncak kejayaan intelektual dalam sejarah peradaban Islam. Al-Ma'mun tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai patron ilmu pengetahuan yang secara aktif mendorong kegiatan ilmiah, penelitian, dan pengembangan rasionalitas.

Salah satu kontribusi monumental Al-Ma'mun adalah pengembangan Bayt al-Hikmah di Baghdad. Institusi ini berfungsi sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pendidikan ilmiah terbesar pada masanya. Melalui Bayt al-Hikmah, karya-karya klasik Yunani, Persia, dan Sanskerta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga memperkaya khazanah intelektual Islam dan menjadi jembatan transfer ilmu menuju dunia Barat. Selain mendukung kegiatan penerjemahan, Al-Ma'mun juga mendorong penelitian praktis, antara lain melalui pendirian observatorium astronomi serta pelaksanaan kajian ilmiah interdisipliner yang melibatkan ulama, filsuf, dan ilmuwan dari beragam latar belakang.

Kebijakan intelektual Al-Ma'mun ditopang oleh sikap politiknya yang relatif inklusif dan terbuka terhadap perbedaan pandangan. Hal ini memungkinkan terciptanya iklim ilmiah yang lebih bebas dari dogmatisme teologis yang kaku, sekaligus menumbuhkan budaya debat dan diskusi kritis. Selain itu, kebijakan pemberian penghargaan dan imbalan besar kepada ilmuwan, penerjemah, serta penulis karya ilmiah, mendorong produktivitas intelektual secara signifikan.⁷

Dengan demikian, masa pemerintahan Al-Ma'mun dapat dipandang sebagai fase emas perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam klasik. Dampak dari kebijakan intelektual tersebut tidak hanya terbatas pada dunia Islam, tetapi juga

⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 10-15

⁷ Fatimah Al Jahra., dkk, "Masa Keemasan Intelektual Islam: Studi Historis Pendidikan Islam pada Era Khalifah Al-Ma'mun", *Reflection: Islamic Education Journal*, 2 (3), hlm. 190-192

memberikan pengaruh jangka panjang terhadap perkembangan pemikiran ilmiah di Eropa Barat pada periode Renaisans.

2. Rasionalisme Teologi Mu'tazilah dan Legitimasi Kekuasaan

Mu'tazilah merupakan salah satu aliran teologi rasional dalam Islam yang berkembang sejak abad ke-8 M, terutama di lingkungan intelektual Dinasti Abbasiyah. Aliran ini menekankan pentingnya rasionalitas, keadilan Ilahi, serta kebebasan manusia dalam beragama dan bertindak. Dalam kerangka epistemologisnya, Mu'tazilah memandang bahwa akal memiliki peran fundamental dalam memahami wahyu sekaligus menafsirkan prinsip-prinsip etika universal. Konsep tersebut berakar pada pandangan bahwa Tuhan adalah hakim yang Mahaadil dan tidak bertindak secara sewenang-wenang; karenanya, manusia diberi kebebasan untuk memilih sekaligus memikul tanggung jawab atas konsekuensi dari setiap tindakannya.

Penolakan terhadap doktrin fatalisme menjadikan Mu'tazilah menekankan aspek tanggung jawab moral individu, yang secara tidak langsung memberikan dasar bagi legitimasi politik. Kekuasaan dianggap sah apabila dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, rasionalitas, serta menjamin kebebasan manusia sebagai makhluk berakal. Rasionalisme teologis Mu'tazilah dengan demikian tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi juga memiliki implikasi etis dan politis dalam tata kelola masyarakat serta dalam penguatan supremasi hukum.⁸

Lebih jauh, pemikiran Mu'tazilah menunjukkan bahwa penggunaan akal dalam teologi dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan sosial dan kebebasan beragama, sekaligus mengawal praktik kekuasaan agar tidak menyimpang dari prinsip moralitas. Dalam perspektif kontemporer, gagasan Mu'tazilah mengenai keadilan Ilahi, kebebasan kehendak manusia, dan supremasi akal tetap memiliki relevansi untuk merespons dinamika sosial, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, agar tetap aplikatif, konsep-konsep tersebut memerlukan reinterpretasi kritis sehingga dapat disesuaikan dengan konteks zaman modern tanpa kehilangan substansi filosofisnya.

3. Kritik Epistemologis terhadap Rasionalisme: Lahirnya Sintesis Asy'ariyah

a) Kritik Epistemologis terhadap Rasionalisme

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang berfokus pada kajian tentang hakikat, sumber, dan batas-batas pengetahuan manusia. Dalam tradisi filsafat Barat, rasionalisme muncul sebagai salah satu aliran utama yang menempatkan akal (*ratio*) sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut pandangan ini, kebenaran dapat dicapai melalui deduksi logis yang bersifat apriori, yakni pengetahuan yang diperoleh sebelum pengalaman empiris dan tidak bergantung pada data inderawi. Tokoh-tokoh seperti René Descartes, Spinoza, dan Leibniz merupakan representasi kuat dari pandangan ini.

Namun, pendekatan rasionalisme murni tidak lepas dari kritik epistemologis. Salah satu kritik paling berpengaruh datang dari Immanuel Kant, yang berupaya menyintesis rasionalisme dengan empirisme. Kant menegaskan bahwa pengetahuan manusia terbentuk melalui perpaduan antara unsur apriori (akal) dan unsur aposteriori (pengalaman). Dalam pandangannya, akal menyediakan kerangka konseptual yang memungkinkan manusia memahami dunia, tetapi isi pengetahuan tetap berasal dari pengalaman. Ia menolak klaim rasionalisme ekstrem yang mencoba menjangkau realitas metafisik di luar batas pengalaman manusia. Dengan demikian, Kant membatasi kemampuan rasio agar tidak terjebak dalam spekulasi metafisis yang tidak dapat diverifikasi secara empiris.

Kritik epistemologis ini memberikan peringatan penting bahwa rasionalisme yang berdiri sendiri tanpa verifikasi empiris berpotensi melahirkan asumsi yang spekulatif dan

⁸ Ahmad Riduan., dkk, "Mu'tazilah di Era Modern: Kajian Konsep Keadilan, Kebebasan, dan Rasionalitas dalam Pemikiran Islam", *Jurnal Studi Islam dan Muhammadiyah (JASIKA)*, 5 (1), hlm. 37-39

tidak memiliki dasar validasi objektif. Sebaliknya, empirisme yang terlalu ekstrem juga gagal menjelaskan prinsip universal yang bersifat niscaya. Dari ketegangan ini, lahirlah pendekatan epistemologi kritis yang lebih seimbang, yang menempatkan akal dan pengalaman sebagai dua pilar utama dalam proses pembentukan pengetahuan manusia.⁹

b) Lahirnya Sintesis Asy'ariyah pada Masa Abbasiyah

Masa Dinasti Abbasiyah (750-1258 M) dikenal sebagai era keemasan peradaban Islam, ketika perkembangan intelektual, ilmiah, dan teologis mencapai puncaknya. Dalam bidang teologi (ilmu kalam), perdebatan tajam muncul antara dua aliran besar: kelompok Mu'tazilah yang mengedepankan rasionalisme teologis dan kalangan Hanabilah atau Salafiyah yang cenderung tekstualis dan menolak penggunaan akal dalam memahami wahyu.

Dalam konteks intelektual yang penuh dialektika tersebut, muncul Abu Hasan al-Asy'ari (w. 330 H), seorang teolog yang awalnya merupakan pengikut setia Mu'tazilah. Setelah melalui proses refleksi mendalam, al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dan mengembangkan pendekatan baru yang berupaya mensintesis antara rasionalisme dan tekstualisme. Ia menegaskan bahwa wahyu (naql) tetap menjadi sumber kebenaran tertinggi, namun akal ('aql) memiliki peran penting dalam menafsirkan dan mempertahankan kebenaran wahyu tersebut dalam batas-batas yang wajar. Pendekatan moderat inilah yang kemudian dikenal sebagai Asy'ariyah, sebuah teologi "poros tengah" yang berusaha menghindari ekstremitas dua kutub pemikiran sebelumnya.¹⁰

Melalui pendekatan ini, al-Asy'ari mengajukan kritik terhadap rasionalisme Mu'tazilah yang terlalu membebaskan akal hingga menafikan otoritas wahyu, sekaligus menolak kekakuan kelompok tekstualis yang menolak peran rasio sama sekali. Dengan demikian, Asy'ariyah menjadi jembatan yang menyeimbangkan dimensi rasional dan spiritual dalam tradisi teologi Islam. Dukungan politik dari Khalifah al-Mutawakkil, yang mengakhiri dominasi Mu'tazilah di istana Abbasiyah, turut memperkuat posisi Asy'ariyah sebagai mazhab teologi resmi Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

c) Metodologi dan Kontribusi Teologi Asy'ariyah

Dalam aspek metodologis, al-Asy'ari mengintegrasikan dalil naqli (wahyu) dan dalil 'aqli (akal) secara harmonis. Ia tidak menempatkan akal sebagai penentu kebenaran yang mutlak, tetapi sebagai sarana untuk memahami, menjelaskan, dan membela kebenaran wahyu. Pendekatan ini menjadikan Asy'ariyah sebagai mazhab yang adaptif terhadap tantangan intelektual zamannya tanpa kehilangan pijakan pada dasar-dasar normatif Islam.

Beberapa karya penting al-Asy'ari antara lain Al-Ibanah 'an Ushul ad-Diyanah, yang menjelaskan fondasi akidah Islam secara moderat; Al-Luma' fi al-Radd 'ala Ahl az-Zaigh wa al-Bida', yang membantah penyimpangan teologis dengan pendekatan rasional; dan Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin, yang menjadi karya ensiklopedis pertama tentang berbagai sekte dan aliran dalam Islam.

Kontribusi Asy'ariyah tidak hanya pada aspek teologi, tetapi juga pada pengembangan epistemologi Islam yang menempatkan wahyu dan akal dalam hubungan dialogis. Sintesis yang ditawarkan al-Asy'ari menunjukkan bahwa penggunaan akal tidak harus berlawanan dengan keimanan, melainkan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat keyakinan dan menjelaskan ajaran agama secara rasional. Dalam hal ini, teologi Asy'ariyah menjadi representasi dari epistemologi Islam yang seimbang – rasional tetapi tetap berakar pada wahyu, ilmiah tetapi tidak kehilangan dimensi spiritualnya.¹¹

⁹ Jauhan Budiwan, *Kritik Immanuel Kant Terhadap Faham Rasionalisme dan Empirisme*

¹⁰ Muhyidin dan Zamroni Ishaq, "Metodologi Al-Asy'ari (Studi Bangunan Teologi Al-Asy'ari)", *Ummul qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 18 (1), hlm. 36-39

¹¹ Ibid., hlm. 40-43

4. Dialektika Politik dan Teologi Masa Abbasiyah

Dinasti Abbasiyah (750-1258 M) merupakan salah satu fase paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa ini, Islam tidak hanya berperan sebagai sistem keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan politik, sosial, dan intelektual yang mampu mengintegrasikan berbagai tradisi ilmu pengetahuan dari peradaban-peradaban terdahulu. Dialektika antara politik, teologi, dan tradisi intelektual yang berlangsung sepanjang periode Abbasiyah menghasilkan fondasi kokoh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teologi Islam klasik. Perpaduan antara otoritas politik, dinamika teologis, dan semangat ilmiah menciptakan karakter khas peradaban Islam yang inklusif, progresif, dan berorientasi pada keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas.

a) Dialektika Politik dan Teologi

Dinasti Abbasiyah (750 M - 1258 M) menandai periode penting dalam sejarah Islam di mana kekhalifahan bertransformasi menjadi sistem politik yang menuntut para pemimpin, atau khalifah, untuk tidak hanya menjadi pemimpin administratif, tetapi juga sebagai pelindung agama dan penjaga ortodoksi keislaman. Keterjalinan erat antara kekuasaan politik dan wacana keagamaan ini didorong oleh ambisi penguasa untuk memperkokoh legitimasi mereka dengan memanfaatkan teologi sebagai instrumen yang kokoh¹², suatu kebutuhan yang muncul seiring dengan perbedaan sistem politik dari era Umayyah sebelumnya. Sejak awal, konflik internal seringkali dilatarbelakangi oleh unsur politik¹³, dan dengan berkembangnya Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan gerakan penerjemahan yang memperkaya diskursus intelektual—dipengaruhi oleh Hellenisme dan Persia—konflik teologis pun tak terhindarkan. Dalam konteks ini, teologi spekulatif (*Ilmu Kalam*) muncul untuk mempertahankan akidah Islam dengan logika rasional¹⁴, namun perdebatan ini dengan cepat beralih dari diskursus murni spiritual ke pertarungan wacana antara kepentingan otoritarianisme negara dan kebebasan intelektual komunitas ulama independen.

Pergulatan teologis sentral yang kemudian diseret ke ranah politik adalah konfrontasi doktrinal antara kelompok Mu'tazilah, yang menekankan supremasi akal (*Aql*) dan kebebasan kehendak manusia, dengan kelompok tradisional *Ahl al-Hadith* atau Hanabilah, yang menuntut ketaatan mutlak terhadap teks wahyu (*Naql*). Isu paling sentral yang menjadi arena pertarungan adalah status ontologis Al-Qur'an: apakah ia *makhluk* (ciptaan), sebagaimana diyakini Mu'tazilah yang berpegang pada prinsip *Tauhid* mutlak¹⁵, ataukah ia *qadim* (tidak diciptakan) dan Firman Abadi Allah, seperti yang dipegang teguh oleh *Ahl al-Hadith*. Khalifah Al-Ma'mun menyadari bahwa selama otoritas keagamaan tertinggi dipegang oleh para ulama independen yang populer di kalangan masyarakat, kekuasaan politiknya tidak akan absolut. Oleh karena itu, Al-Ma'mun secara resmi menerima doktrin Mu'tazilah pada tahun 827 M¹⁶, menjadikannya strategi politik untuk mendirikan ortodoksi negara, mengontrol pengaruh ulama di masyarakat, dan bahkan mendapatkan dukungan dari kelompok Syi'ah yang cenderung lebih rasionalis.

Keterlibatan negara dalam urusan teologi mencapai puncaknya pada tahun 833 M dengan diinstitusikannya kebijakan represif yang dikenal sebagai *al-Mihnah* (inkuisisi). *Al-Mihnah* secara operasional memaksa para ulama, pejabat, dan hakim untuk menerima doktrin resmi negara tentang *Khalaq al-Qur'an* [Kueri Awal], menegaskan bahwa teologi telah diinstrumentalisasi demi sentralisasi kekuasaan. Kebijakan ini berlanjut di bawah penerusnya, Khalifah Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq, yang bahkan meningkatkan represi, termasuk penyiksaan fisik dan hukuman mati terhadap penentang keras. Imam Ahmad ibn

¹² Abdul Muim, Taib Thahir. *Ilmu Kalam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

¹³ Hanafi, Ahmad. *Theologi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

¹⁴ Hassan, Hassan Ibrahim. *Tarikh*. Mesir: Maktabah An-Nahdah Al-Mishriyyah, 1976.

¹⁵ Hitti, Philip K. *History of The Arabs*. Jakarta: Serambi, 2010.

¹⁶ Nasution, Harun. *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UII Press, 1986.

Hanbal menjadi tokoh sentral resistensi *Ahl al-Hadith*; beliau menolak campur tangan negara dan doktrin *Khalaq al-Qur'an*, yang menyebabkan beliau dicambuk dan dipenjara di bawah Al-Mu'tasim. Keteguhan Imam Ahmad, yang dikenal *wara'* (saleh) dan *faqih* (ahli hukum Islam)¹⁷, mengubahnya menjadi simbol perlawanan dan martir bagi mayoritas umat Muslim, sebuah perkembangan yang justru mengikis legitimasi politik penguasa dan Mu'tazilah.

Titik balik kebijakan ini terjadi ketika Khalifah Al-Mutawakkil naik takhta pada tahun 847 M. Menyusul sentimen anti-Mu'tazilah yang meluas, Al-Mutawakkil secara resmi mencabut dekrit *Khalaq al-Qur'an* dan menghentikan *al-Mihnah* yang telah berlangsung selama hampir lima belas tahun. Keputusan ini adalah langkah politik yang cerdas dan pragmatis; dengan membatalkan inkuisisi, membebaskan Imam Ahmad¹⁸, dan merehabilitasi ulama tradisional—yang kini diundang ke istana—Al-Mutawakkil berhasil mengamankan legitimasi populis dan membangun basis kekuasaan yang kuat berdasarkan dukungan mayoritas ulama dan rakyat. Penghentian *Mihnah* menandai kegagalan Mu'tazilah sebagai ideologi negara, terutama karena penggunaan metode inkuisisi yang represif dan sikap eksklusif Mu'tazilah yang menimbulkan kebencian masyarakat. Kegagalan ini secara efektif menetapkan batasan sejauh mana kekuasaan politik dapat mendikte keyakinan teologis fundamental umat, sekaligus menandai kebangkitan kembali otoritas ulama tradisional yang kemudian dikenal sebagai *Ahl al-Sunnah wal Jama'ah*, kelompok mayoritas yang berpegang teguh pada sunnah.

Dampak jangka panjang dari dialektika ini sangat mendalam: meskipun *Ahl al-Hadith* memenangkan pertarungan politik dan memperoleh dukungan mayoritas, mereka menyadari perlunya kerangka filosofis yang kuat untuk melawan Mu'tazilah di ranah intelektual. Kebutuhan untuk mempertahankan doktrin tradisional (*Naql*) dengan menggunakan alat logika (*Aql*) yang canggih melahirkan mazhab teologi baru. Abul Hasan al-Ash'ari, yang awalnya seorang Mu'tazili, kemudian keluar dan mengembangkan pendekatan sintesis yang dikenal sebagai Teologi Asy'ariyah. Mazhab ini mempertahankan doktrin tradisional, seperti *qadim*-nya Al-Qur'an, tetapi mengadopsi dan menyempurnakan metode dialektika Mu'tazilah. Sintesis Asy'ariyah ini memungkinkan *Ahl al-Sunnah wal Jama'ah* untuk mengatasi ancaman intelektual rasionalisme ekstrem, menghasilkan kerangka teologis yang stabil dan komprehensif, yang menjadi pilar utama bagi ortodoksi Sunni mayoritas hingga saat ini.

b) Tradisi Intelektual Islam Masa Abbasiyah

Selain menjadi arena perdebatan teologis, masa Abbasiyah juga menandai kebangkitan luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Baghdad, sebagai ibu kota kekhalifahan, berkembang menjadi pusat intelektual dunia melalui pendirian Bayt al-Hikmah (Baitul Hikmah atau Rumah Kebijakan). Institusi ini berfungsi sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban seperti Yunani, Persia, India, dan Romawi.

Gerakan penerjemahan karya-karya ilmiah dan filosofis Yunani ke dalam bahasa Arab membuka babak baru dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam. Para ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga mengkritisi dan memperluas cakrawala pengetahuan tersebut. Tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi (pelopor aljabar), Ibn Sina (Avicenna) dalam filsafat dan kedokteran, Al-Razi dalam kimia dan pengobatan, serta Al-Farabi dalam filsafat politik dan metafisika, menjadi contoh nyata dari semangat ilmiah yang rasional dan empiris. Melalui karya-karya mereka, ilmu pengetahuan Islam menjadi jembatan penting bagi kebangkitan intelektual di dunia Barat pada masa Renaisans.¹⁹

¹⁷ Shiddiqi, Nourouzzaman. *Pengantar Sejarah Muslim*. Yogyakarta: Mentari Masa, 1989.

¹⁸ Sou'yb, Joesoef. *Sejarah Daulat 'Abbasiyah II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

¹⁹ Ibid., hlm. 25

Sementara itu, di ranah spiritual, tasawuf atau mistisisme Islam tumbuh sebagai respons terhadap kebutuhan moral dan etis masyarakat yang tengah mengalami kemajuan material dan intelektual pesat. Para sufi seperti Al-Junaid al-Baghdadi, Al-Hallaj, dan kemudian Al-Ghazali, berupaya memadukan dimensi rasional dengan spiritualitas, menjadikan tasawuf sebagai jalan keseimbangan antara dunia intelektual dan kehidupan batin. Dengan demikian, tradisi intelektual Abbasiyah mencerminkan pluralitas pemikiran yang tidak saling meniadakan, melainkan saling memperkaya.²⁰

c) Warisan dan Implikasi

Warisan teologis masa Abbasiyah memberikan dampak jangka panjang terhadap pembentukan identitas peradaban Islam. Dialektika antara politik dan teologi mengajarkan bahwa kekuasaan dan agama tidak dapat sepenuhnya dipisahkan, tetapi harus dikelola dalam keseimbangan etis agar tidak menindas kebebasan berpikir. Sementara itu, sintesis antara akal dan wahyu yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Asy'ari dan Al-Ghazali menunjukkan kemampuan tradisi Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai spiritualnya.

Lebih jauh, warisan Abbasiyah menegaskan bahwa Islam merupakan peradaban yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan inovasi. Tradisi berpikir kritis, rasional, dan ilmiah yang tumbuh pada masa itu menunjukkan bahwa keimanan tidak bertentangan dengan rasionalitas, melainkan dapat bersinergi untuk mencapai pemahaman yang lebih utuh tentang Tuhan, alam, dan manusia.

Dengan demikian, masa Abbasiyah tidak hanya meninggalkan warisan dalam bentuk karya ilmiah dan lembaga pendidikan, tetapi juga nilai-nilai intelektual yang menempatkan akal, wahyu, dan moralitas dalam harmoni. Dialektika politik dan teologi yang berkembang pada masa itu menjadi fondasi bagi lahirnya peradaban Islam yang humanis, rasional, dan berorientasi pada kemajuan spiritual serta sosial.²¹

4. Simpulan

Khalifah Al-Mamun, sebagai penguasa Dinasti Abbasiyah pada awal abad ke-9 M, memainkan peranan penting dalam mengarahkan jalannya pemikiran teologis dan intelektual Islam. Kebijakan politik Al-Mamun yang menjadikan mazhab Mutazilah sebagai mazhab resmi negara bukan hanya sebuah langkah strategis untuk memperkuat legitimasi pemerintahannya, tetapi juga sebagai manifestasi dari pendekatan rasionalisme dalam teologi Islam. Mazhab Mutazilah, dengan prinsip utama menekankan peran akal, kebebasan kehendak manusia, dan keadilan ilahi, memberikan kerangka filosofis yang melihat bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan kekuasaan sebaiknya dijalankan menurut prinsip keadilan. Kebijakan ini diwujudkan melalui institusi seperti mihnah, yaitu semacam ujian teologis yang mewajibkan para ulama dan pejabat untuk menerima doktrin Mutazilah, terutama mengenai pandangan bahwa Al-Quran adalah ciptaan Allah dan bukan kalam-Nya yang kekal. Kebijakan ini menjadi simbol kuat bagaimana teologi tidak hanya berdiri sebagai kajian keagamaan murni, tetapi juga alat politik yang eksklusif dan otoriter untuk mengonsolidasikan kekuasaan.

Namun, kebijakan tersebut menuai resistensi intelektual yang keras dari ulama dan kelompok tradisional yang menegaskan pentingnya otoritas wahyu dan teks-teks suci tanpa perlu penafsiran rasionalis berlebihan. Resistensi ini memunculkan mazhab Asyariyah sebagai respons yang berupaya menengahi konflik antara akal dan wahyu. Asyariyah mempertahankan posisi bahwa wahyu tetap sebagai sumber kebenaran tertinggi, sementara akal diposisikan sebagai alat yang penting namun dalam batas-batas yang diizinkan untuk memahami dan

²⁰ Muhammad Habib Adi Putra, "Teologi dan Mistisisme Pada Masa Dinasti Abbasiyah", *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 20 (1), hlm. 106

²¹ Mauldia Aslamiah, *Kebudayaan dan Kearifan Daulah Abbasiyah: Warisan Peradaban Islam*, *Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, 4 (3), hlm. 311-314

mempertahankan keharmonisan teologi Islam. Pendekatan ini menjadikan Asyariyah sebagai mazhab moderat yang mengintegrasikan dimensi rasionalitas dan tradisi normatif Islam, sekaligus menjadi fondasi epistemologi Islam yang menyeimbangkan antara pemikiran logis dan iman. Perkembangan ini menunjukkan bahwa intervensi politik pada masa Al-Mamun tidak hanya memperkuat Mutazilah, tetapi juga ikut mendorong lahirnya spektrum pemikiran teologis yang lebih kaya dan kompleks.

Masa pemerintahan Al-Mamun dikenal sebagai era keemasan intelektual Islam yang ditandai dengan pendirian dan pengembangan Bayt al-Hikmah di Baghdad. Institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan terbesar dan pusat penerjemahan karya-karya klasik Yunani, Persia, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab, tetapi juga sebagai sebuah akademi ilmiah yang inklusif. Al-Mamun mendorong penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan interdisipliner, termasuk bidang astronomi dengan didirikannya observatorium lunar, sehingga memperkuat iklim ilmiah progresif yang bebas dari dogmatisme keagamaan yang kaku. Sistem penghargaan terhadap ilmuwan dan penerjemah pun mendorong produktivitas intelektual yang luar biasa, yang tidak hanya berdampak langsung pada dunia Islam, tetapi juga menjadi jembatan penting bagi kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa Barat pada era Renaisans.

Dialektika kuat antara kekuasaan politik dan teologi membentuk ranah intelektual dan sosial pada masa tersebut. Teologi dipakai sebagai instrumen legitimasi politik sekaligus arena pertarungan wacana antara kebebasan berpikir dan otoritarianisme negara. Institusi ilmiah yang diciptakan Al-Mamun merupakan contoh nyata bagaimana negara campur tangan dalam urusan teologis dan memaksakan satu doktrin tertentu yang berpihak pada kekuasaan. Konflik ini menegaskan bahwa perdebatan teologis di masa Abbasiyah bukan hanya pertukaran ide keagamaan, melainkan perebutan pengaruh politik yang intens.

Masa kekhalifahan Abbasiyah di bawah Al-Mamun sebagai sebuah periode transformasi intelektual yang mengukuhkan hubungan erat antara kekuasaan politik dan perkembangan teologis Islam. Kebijakan Al-Mamun mengilustrasikan bagaimana politik dan teologi dapat saling membentuk dan menguatkan, menghasilkan perkembangan teologis yang lebih dinamis dan kompleks melalui promosi Mutazilah dan lahirnya Asyariyah sebagai sintesis. Masa ini menjadi fondasi penting bagi modernitas Islam, di mana rasionalitas dan wahyu dipandang sebagai dua pilar utama dalam pemahaman agama, sekaligus membuka jalan bagi integrasi ilmu pengetahuan dan spiritualitas dalam peradaban Islam yang berkelanjutan.

Daftar Referensi

- Abdul Muim, Taib Thahir. *Ilmu Kalam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Aminullah, A. Najili. (2017). *Dinasti Bani Abbasiyah, Politik, Peradaban, dan Intelektual*. hlm. 20-27.
- Aslamiah, Mauldia. (2024). Kebudayaan dan Kearifan Daulah Abbasiyah: Warisan Peradaban Islam. *Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol. 4 No. 3, hlm. 311-314.
- Brown, Daniel W. (2017). *A New Introduction to Islam*. (Oxford: Wiley-Blackwell).
- Budiwan, Jauhan. (2020). *Kritik Imanuel Kant Terhadap Faham Rasionalisme dan Empirisme*.
- Hanafi, Ahmad. *Theologi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Hassan, Hassan Ibrahim. *Tarikh*. Mesir: Maktabah An-Nahdah Al-Mishriyyah, 1976.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*. Jakarta: Serambi, 2010.
- Hourani, George F. (1956). The Early Growth of the Mu'tazilah. *Jornal of the American Oriental Society*, Vol. 76 No.1, hlm. 15-26.
- Jahra, Fatimah Al., dkk. (2025). Masa Keemasan Intelektual Islam: Studi Historis Pendidikan Islam pada Era Khalifah Al-Ma'mun. *Reflection: Islamic Education Journal*, Vol. 2 No.3, hlm. 190-192.
- Kosim, M. (2008). Ilmu Pengetahuan dalam Islam (Perspektif Filosofis-Historis). *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 2.

- Madelung, Wilferd. (2018). *The Theology of Mu'tazilism: Imamate and Rationalism in Early Islam*, (Oxford: Oxford of University Press).
- Mason, Herbert. (1998). Al-Ma'mun and the Mihna. *Journal of Islamic Studies*, Vol. 9 No.2, hlm. 130-135.
- Muhidin, dan Zamroni Ishaq. (2023). Metodologi Al-Asy'ri (Studi Bangunan Teologi Al-Asy'ari). *Umul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajad (INSUD) Lamongan*, Vol. 18 No.1, hlm. 36-39.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Putra, Muhammad Habib Adi. (2022). Teologi dan Mistisisme Dinasti Abbasiyah. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*. Vo. 20 No. 1, hlm. 106.
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. (Chicago: University of Chicago Press).
- Riduan, Ahmad., dkk. (2025). Mu'tazilah di Era Modern: Kajian Konsep Keadilan, Kebebasan, dan Rasionalitas dalam Pemikiran Islam. *Jurnal Studi Islam dan Muhammadiyah (JASIKA)*, Vol. 5 No. 1, hlm. 37-39.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Pengantar Sejarah Muslim*. Yogyakarta: Mentari Masa, 1989.
- Sou'yb, Joesoef. *Sejarah Daulat 'Abbasiyah II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Watt W. Montgomery. (1962). *Islamic Philosophy and Theology*. (Edinburgh: Edinburgh University Press).